



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2019**

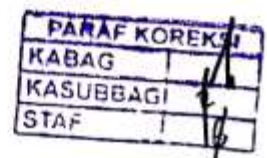
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 – 2021**

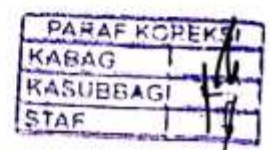
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



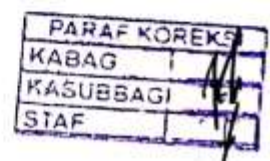
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3112);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 – 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 381), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI






Diundangkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 548

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL: KADAG ADM. HUKUM
	 INDRA HADIWINATA, SH.MT : 197310232002121008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 - 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur $UHH = \frac{\text{Jumlah Umur masing-masing orang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}}$	Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)	$\frac{\text{Banyaknya Balita Gizi Kurang}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta/bawah dua tahun (%)	$\frac{\text{Banyaknya Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang diukur}} \times 100\%$	Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunisation) (%)	$\frac{\text{Jumlah Desa atau Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa atau Kelurahan}} \times 100\%$	Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (pustu/poskesdes)	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang belum memiliki sarana kesehatan}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 100\%$	Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi murni (APM) SD (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD}}{\text{MI/PaketA}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk Kelompok usia 7-12 tahun}}{\text{MI/PaketA}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi murni (APM) SLTP (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SD}}{\text{MI/PaketA}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk Kelompok usia 13-15 tahun}}{\text{MI/PaketA}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: PDRB t = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB t-1 = DPRB ADHK pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik	Bagian Administrasi Perekonomian
		Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi dari Sektor Pertanian/Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan.	Persentase panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Persentase Panjang jalan sentra produksi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Sentra Produksi dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Sentra Produksi Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
5	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan hortikultura	$\frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun } t - \text{Jumlah Prod tanaman Pangan Tahun } t-1}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Persentase peningkatan produksi daging ternak	$\frac{\text{Jumlah Produksi Daging Ternak Tahun } t - \text{Jumlah Produksi daging ternak Tahun } t-1}{\text{Jumlah Produksi Daging Ternak Tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

PARAF KOREKSI
KABAG
KASUBBAG
STAF

		Rata-Rata Lama Tinggal	$\frac{\text{Jumlah Hari wisatawan tinggal atau menginap}}{\text{Jumlah wisatawan}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata																																																																																																																																																																																																										
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (orang)	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun } t - \text{Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun } t-1}{\text{Jumlah wisatawan Mancanegara Tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata																																																																																																																																																																																																										
		Persentase peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara (pertahun)	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun } t - \text{Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun } t-1}{\text{Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata																																																																																																																																																																																																										
6	Meningkatnya Kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																																																																																																																																																																																																										
		Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																																																																																																																																																																																																										
7	Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal Terjadi dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Data Kriminalitas Polres RL	Kesatuan Bangsa dan Politik																																																																																																																																																																																																										
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPK	BPKD																																																																																																																																																																																																										
		Nilai Evaluasi SAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indikator</th> <th>Nilai</th> <th>SKK (Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Transparansi Keuangan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Kelembagaan</td> <td>4,00</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	No	Indikator	Nilai	SKK (Kategori)	1	Transparansi Keuangan	4,00	4	2	Kelembagaan	4,00	4	3	Kelembagaan	4,00	4	4	Kelembagaan	4,00	4	5	Kelembagaan	4,00	4	6	Kelembagaan	4,00	4	7	Kelembagaan	4,00	4	8	Kelembagaan	4,00	4	9	Kelembagaan	4,00	4	10	Kelembagaan	4,00	4	11	Kelembagaan	4,00	4	12	Kelembagaan	4,00	4	13	Kelembagaan	4,00	4	14	Kelembagaan	4,00	4	15	Kelembagaan	4,00	4	16	Kelembagaan	4,00	4	17	Kelembagaan	4,00	4	18	Kelembagaan	4,00	4	19	Kelembagaan	4,00	4	20	Kelembagaan	4,00	4	21	Kelembagaan	4,00	4	22	Kelembagaan	4,00	4	23	Kelembagaan	4,00	4	24	Kelembagaan	4,00	4	25	Kelembagaan	4,00	4	26	Kelembagaan	4,00	4	27	Kelembagaan	4,00	4	28	Kelembagaan	4,00	4	29	Kelembagaan	4,00	4	30	Kelembagaan	4,00	4	31	Kelembagaan	4,00	4	32	Kelembagaan	4,00	4	33	Kelembagaan	4,00	4	34	Kelembagaan	4,00	4	35	Kelembagaan	4,00	4	36	Kelembagaan	4,00	4	37	Kelembagaan	4,00	4	38	Kelembagaan	4,00	4	39	Kelembagaan	4,00	4	40	Kelembagaan	4,00	4	41	Kelembagaan	4,00	4	42	Kelembagaan	4,00	4	43	Kelembagaan	4,00	4	44	Kelembagaan	4,00	4	45	Kelembagaan	4,00	4	46	Kelembagaan	4,00	4	47	Kelembagaan	4,00	4	48	Kelembagaan	4,00	4	49	Kelembagaan	4,00	4	50	Kelembagaan	4,00	4
No	Indikator	Nilai	SKK (Kategori)																																																																																																																																																																																																												
1	Transparansi Keuangan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
2	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
3	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
4	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
5	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
6	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
7	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
8	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
9	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
10	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
11	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
12	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
13	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
14	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
15	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
16	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
17	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
18	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
19	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
20	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
21	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
22	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
23	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
24	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
25	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
26	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
27	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
28	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
29	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
30	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
31	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
32	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
33	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
34	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
35	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
36	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
37	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
38	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
39	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
40	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
41	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
42	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
43	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
44	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
45	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
46	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
47	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
48	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
49	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
50	Kelembagaan	4,00	4																																																																																																																																																																																																												
		Nilai EKPPD atas LKPJ	Dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Otda pada saat tahun berikutnya, dengan range : < 2,0000 : Rendah 2,0001 s.d. 2,9999 : Tinggi > 3,0000 : Sangat Tinggi	Laporan Seluruh OPD dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018	Bagian Administrasi Pemerintahan																																																																																																																																																																																																										
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik	<p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per User}}{\text{Total skor yang bisa}} \times \text{Nilai pembobot}$ </p> <p> Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah dasar}} = \frac{1}{10} = 0,01$ </p> <p> Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$ </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL SKOR</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI SKOR</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKOR	NILAI INTERVAL KONVERSI SKOR	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Administrasi Organisasi																																																																																																																																																																																	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKOR	NILAI INTERVAL KONVERSI SKOR	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																																																																																																																																																																																											
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik																																																																																																																																																																																																											
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik																																																																																																																																																																																																											
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																																																																																																																																																																																																											
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik																																																																																																																																																																																																											

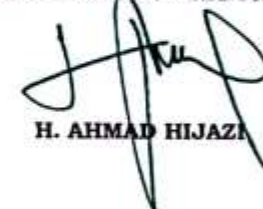
PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUBBAG
 STAF

10	Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang sesuai kualifikasi pendidikan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Data Kepegawaian	BKPSDM																													
11	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.	Rasio Elektrifikasi	$\frac{RT \text{ PLN} + RT \text{ Non PLN}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	DPMPTSP	DPMPTSP																													
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik/ Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	SK Status Jalan	DPUPRPKP																													
		Persentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPRPKP	DPUPRPKP																													
		Persentase rumah tangga bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah Tangga Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPRPKP	DPUPRPKP																													
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Kumuh}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	KOTAKU	DPUPRPKP																													
		Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial																													
	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM = $\frac{1}{3}(IDH + IAS + IGS)$</p> <p>IDH = $\frac{1}{3}(E + Y + N)$</p> <p>E = Indeks harapan hidup</p> <p>Y = Indeks pertumbuhan = $\frac{\text{Pertumbuhan penduduk}}{\text{Penduduk}} \times 100$</p> <p>N = Indeks standar hidup layak</p> <p>IAS = $\frac{1}{3}(R + S + T)$</p> <p>R = Indeks Rasio</p> <p>S = Indeks Standar</p> <p>T = Indeks Standar</p> <p>I = Indeks Standar</p> <p>IGS = $\frac{1}{3}(G + H + I)$</p> <p>G = Indeks Standar</p> <p>H = Indeks Standar</p> <p>I = Indeks Standar</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot</th> <th>Nilai</th> <th>Skala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td> <td>80</td> <td>2/3</td> <td>53,33</td> <td>0-100</td> </tr> <tr> <td>Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)</td> <td>90</td> <td>1/3</td> <td>30,00</td> <td>0-100</td> </tr> <tr> <td>Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)</td> <td>100</td> <td>1/3</td> <td>33,33</td> <td>0-100</td> </tr> <tr> <td>Indeks Ketahanan Sosial (IKS)</td> <td>110</td> <td>1/3</td> <td>36,67</td> <td>0-100</td> </tr> <tr> <td>Kategori per kapita yang disarankan</td> <td>74,72</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai	Skala	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	2/3	53,33	0-100	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	90	1/3	30,00	0-100	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	100	1/3	33,33	0-100	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	110	1/3	36,67	0-100	Kategori per kapita yang disarankan	74,72	-	-	-	Badan Pusat Statistik	Bappeda
Indikator	Nilai	Bobot	Nilai	Skala																														
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	2/3	53,33	0-100																														
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	90	1/3	30,00	0-100																														
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	100	1/3	33,33	0-100																														
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	110	1/3	36,67	0-100																														
Kategori per kapita yang disarankan	74,72	-	-	-																														
12	Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal.	Indeks Desa Membangun	$IDM = \frac{1}{3}(IKL + IKE + IKS)$ <p>Keterangan:</p> <p>IDM = Indeks Desa Membangun</p> <p>IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)</p> <p>IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi</p> <p>IKS = Indeks Ketahanan Sosial</p> <p>Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$ 2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$ 3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$ 4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ 5. Desa Desa Mandiri : $> 0,815$ 	Badan Pusat Statistik atau Kementerian PDT	DPMD																													
13	Mengurangi resiko kerusakan lingkungan.	Indeks Kualitas Air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Baku Mutu}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimal}}}{2}}$ <p>$0 \leq PI_i \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PI_i \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_i \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p> <p>$PI_i > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p>	Hasil Uji Laboratorium	DLH																													
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \lfloor 50/0,9 \times (IU - 0,1) \rfloor$	Hasil Uji Laboratorium	DLH																													
		Persentase pengelolaan sampah	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang tertangani (m}^3\text{)}}{\text{Total Jumlah Timbunan Sampah di Kabupaten}} \times 100 \%$	DLH	DLH																													

PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUBBAG
 STAF

14	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Total Desa di Zona Merah (Berisiko Tinggi)}} \times 100 \%$	BPBD	BPBD
		Persentase sekolah aman bencana	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Aman Bencana}}{\text{Total Sekolah di area rawan bencana}} \times 100 \%$	BPBD	BPBD
15	Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga.	Indeks pembangunan gender (IPG)	$\text{IPG} = \frac{\text{IPM perempuan}}{\text{IPM laki-laki}}$ Klasifikasi IPG adalah : 1. IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki 2. IPG = 100, capaian perempuan = capaian laki-laki	Badan Pusat Statistik	DP3A&KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rata-rata dari : 1. Proporsi kerwakilan di Parlemen keterwakilan di Parlemen Laki-laki dan Perempuan; 2. Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan 3. Upah Buruh Non Pertanian, laki-laki dan Perempuan	Badan Pusat Statistik	DP3A&KB

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

